

# Maluku dan Keindahan Sejarahnya

*By* Abidin Wakano

## Maluku dan Keindahan Sejarahnya

### Harmoni Kehidupan Masyarakat Maluku yang Berbasis Kearifan Lokal

---

Dr. Abidin Wakano, M. Ag

#### A. Pendahuluan

Secara geografis, luas keseluruhan Provinsi Maluku adalah 581.376 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 527.191 km<sup>2</sup> dan luas daratan 54.185 km<sup>2</sup>, hal ini berarti sekitar 90 % wilayah Provinsi Maluku adalah lautan. Letak astronomis Provinsi Maluku adalah 2° 30'-9° lintang selatan dan 120°-136° Bujur Timur, dan dibatasi oleh laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur, serta Laut dan Pulau Sulawesi di sebelah barat. Karena itu, sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki wilayah yang sangat luas jika dilihat dari luas daratan dan lautan dari utara sampai ke selatan. Jumlah pulau di Maluku kurang lebih 1.412 buah, dua buah di antaranya yang besar adalah pulau Seram dan Pulau Buru.<sup>1</sup>

Dari aspek budaya, masyarakat Maluku memiliki kurang lebih Lima puluh kelompok suku bangsa dan sub-suku, karena itu memiliki keanekaragaman budaya yang cukup kaya. Hal tersebut dapat dilihat pada begitu beragamnya <sup>7</sup> bahasa atau dialek serta suku dan sub-suku di Maluku. Hasil penelitian *Summer Institute of Linguistik (SIL)* menyebutkan bahwa bahasa di Maluku kurang lebih terdiri dari 117 buah. Adapun suku dan sub-suku bangsa lebih dari 100 yang mendiami pulau-pulau kecil di kepulauan Maluku, yang terbentang dari utara sampai ke selatan.<sup>2</sup> Itulah sebabnya di samping ada identifikasi diri sebagai

---

<sup>1</sup> Pemda Provinsi Maluku, <sup>12</sup> *Maluku dalam Angka, 2003* (Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2003), hlm. 3-6.

<sup>12</sup> <sup>2</sup> Taber, Mark, dkk., *Atlas Bahasa Tanah Maluku* (Badan Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan Universitas Pattimura dan Summer Institute of Linguistic Ambon, 1996).

suku bangsa di Maluku seperti orang Bugis, Makassar, Buton, atau Jawa dan sebagainya, juga terdapat orang Ambon, orang Seram, orang Kei, orang Buru, orang Lease, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Walaupun memiliki tingkat keragaman yang cukup besar seperti itu, tapi pada dasarnya secara kultural akar kebudayaan orang Maluku itu sama, yaitu berdasarkan pandangan kosmologinya yang monodualistik, yaitu *Siwalima*. Pandangan monodualistik ini adalah nilai inti yang membentuk kepribadian masyarakat Maluku. Akar budaya orang Maluku ditemukan dalam kebudayaan orang-orang Melanesia yang mendiami gugusan kepulauan yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik. Realisme-historis menunjukkan bahwa Melanesia adalah ras asli dari masyarakat awal yang mendiami kepulauan Maluku.<sup>4</sup> Menurut Saleh Putuhena, orang-orang Maluku sendiri menamakan diri mereka dengan sebutan orang Alifuru yang mendiami pulau-pulau besar di Maluku sebagai leluhurnya. Dalam *oral tradition* orang-orang Maluku, sebelum leluhurnya tersebar ke pelbagai pulau kecil di Maluku, orang-orang Melanesia itu mendiami pulau-pulau besar tersebut. Pulau-pulau besar yang dimaksud adalah pulau Seram, pulau Halmahera dan pulau Buru, sehingga di pulau-pulau ini juga terdapat suku-suku terasing yang memiliki karakteristik yang mirip.<sup>5</sup>

Beberapa ciri yang orang Melanesia yang digambarkan oleh Worsley juga ditemukan pada orang-orang Alifuru yang sampai sekarang masih mendiami pedalaman Pulau Seram. Ciri-ciri itu berupa sistem sosial yang berdasarkan aktivitas berkebun kecil-kecilan, aktivitas meramu sagu, kompleks upacara yang bertalian dengan kekeramatan dan rahasia, upacara inisiasi dengan perlambang totemisme, upacara

---

<sup>3</sup> Suku bangsa di Maluku seperti etnis Buton, Bugis, Makassar, Jawa atau etnis lain biasa disebut sebagai orang dagang atau pendatang, sedangkan etnis yang dikategorikan adat seperti etnis Ambon, Seram, Lease, Tenggara, Buru adalah etnis asli yang mendiami pulau-pulau di Maluku, yang umumnya punya negeri serta bahasa tersendiri. Lihat J. Ajawaila, "Dinamika Budaya Orang Maluku", dalam *Maluku Menyambut Masa Depan* (Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005), hlm. 159.

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: GAMA Press, 1987), hlm. 155.

<sup>5</sup> Saleh Putuhena, "Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal di Maluku Tengah, Maluku Tenggara", *Makalah*, 14 Maret 2001, hlm. 3.

pesta babi yang luas serta gerakan-gerakan raja adil yang terkenal dengan nama *cargo-cults*.<sup>6</sup> Menurut Wildferd T. Neil, orang-orang Melanesia tiba di Maluku dengan membawa serta kebudayaannya berupa barang tembikar, busur dan anak panah, kapak pisau dan peralatan lain yang terbuat dari batu asah, ternak babi piaraan, beberapa tanaman bahan makanan, teknik bertani, kerajinan mengukir kayu, keahlian berlayar di laut dengan kano, mengayu (potong kepala), upacara kanibal (makan daging manusia), organisasi rahasia dan organisasi lainnya.<sup>7</sup> Sebagian besar dari kebudayaan Melanesia itu masih terlihat di Maluku Tengah. Sebagaimana pandangan kosmologis orang Maluku, yaitu *Siwa* dan *Lima*, pada orang Melanesia juga memandang dunia dengan konsep *sociocosmic dualism* yang terdiri atas Melanesia Utara yang mendiami kepulauan Solomon dan Melanesia Selatan yang mendiami New Calidonia dengan perbedaan budaya dengan perbedaan budaya tertentu, terutama berupa mantifak atau wujud pemikiran.<sup>8</sup> Pandangan yang sama terlihat pada orang Alifuru yang ditandai dengan pembagian masyarakat berdasarkan lokasi. Kelompok Alune mendiami daerah Sungai Sapalewa di utara (atas), sedangkan kelompok Wemale mendiami Sungai Tala di selatan (bawah). Pandangan kosmologis yang dualistis ini sangat memengaruhi kebudayaan di Maluku Tengah. Hingga dewasa ini, sebagian dari budaya dahulu, baik masyarakat Melanesia maupun Alifuru seperti yang telah digambarkan sebelumnya, masih eksis melalui penyesuaian tertentu. Demikian halnya dengan pandangan kosmologi yang dualisme sebagai aspek idealisasi dan wujud mantifak dari kebudayaan Melanesia itu menjadi salah satu akar budaya Maluku. Atas dasar inilah, terbentuk kultur dan struktur masyarakat di Maluku.<sup>9</sup>

Dalam memori kolektif masyarakat Maluku, sesungguhnya masyarakat asli Maluku yang mendiami gugusan kepulauan Maluku, leluhurnya berasal dari Pulau Seram yang terkenal dengan sebutan *Nusa*

16

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 284.

<sup>7</sup> Kebiasaan potong kepala ini bahkan masih menjadi suatu ketakutan bagi masyarakat Maluku. Dalam memori-kolektif masyarakat Maluku, terutama terakhir kurang lebih sepuluh tahun yang lalu (masa Orba) potong kepala ini menjadi isu yang sangat menakutkan ketika ada pembuatan jalan dan jembatan, konon kabarnya kepala manusia yang ditanam pada pembangunan seperti itu, akan membuat bangunan itu menjadi kuat. Wildferd T. Neil, *Twentieth Century Indonesia* (Columbia University Press, 1973).

<sup>8</sup> David Howes, *On The Odour of The Soul* (BKI, Deel 144, Ie Aflevering, 1988), hlm. 86.

<sup>9</sup> Saleh Putuhena, "Beberapa Pokok", hlm. 4.

*Ina* (Pulau Ibu). Menurut tradisi lisan yang seringkali disampaikan dalam bentuk *Kapata* (kisah dalam bentuk nyanyian atau Pantun), pada suatu waktu, kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk secara geneologis, meninggalkan daerah asalnya untuk bermukim di daerah lain atau pulau-pulau di sekitar Pulau Seram. Sebab-sebab kepindahan serta daerah mana mereka berasal sulit untuk dideskripsikan. Imam Rijali, seorang pejuang dan sejarawan dari Tanah Hitu yang hidup pada abad XVII, dalam karya monumentalnya *Hikayat Tanah Hitu* pada bagian kisah I menjelaskan tentang asal mula penduduk Tanah Hitu (bagian utara Pulau Ambon) itu berasal dari Tanunu di Seram Barat. Di tanah yang baru itu mereka menempati daerah pegunungan *Paunusa*. Pendetang pertama itu adalah kelompok Soupele.<sup>10</sup> Karakteristik masyarakat Maluku Tengah sama, maka dapat diperkirakan pola perpindahan kelompok-kelompok lain pada saat itu juga dalam pola yang sama seperti masyarakat Hitu. Menurut Saleh Putuhena, mungkin perpindahan orang Alifuru dari Tanunu di Seram Barat ke Hitu itu, juga berlangsung melalui suatu kurun waktu yang lama dalam bentuk kelompok yang terbentuk atas dasar geneologis. Dapat diperkirakan bahwa perpindahan orang-orang Alifuru ke pulau-pulau lainnya pada waktu yang sama dengan pola seperti di Hitu.<sup>11</sup>

Di tempat yang baru itu mereka hidup dalam kelompok-kelompok keluarga yang kemudian terkenal dengan sebutan *Lumatau* (keluarga/Famili) secara terpisah meskipun tidak berjauhan. Perkembangan selanjutnya beberapa *Lumatau* yang berdekatan membentuk *Aman* atau *Hena* sebagai satuan pemukiman atau yang sekarang dikenal dengan negeri. Sesuai dengan pandangan kosmologi mereka yang dualisme serta mengikuti pola *alune* dan *Wemale*; di tanah yang baru terbentuk semacam konfederasi yang disebut *Uli*, untuk di Seram disebut sebagai *pata*. Terdapat dua macam *Uli*, yaitu *Ulilima* dan *Ulisiwa*. Pada umumnya yang tergabung dalam *Ulilima* adalah kurang lebih Lima *aman* dan pada umumnya menempati daerah utara (atas) pulau dan *Ulisiwa* gabungannya sembilan *aman* yang

---

<sup>10</sup> Manusama J.Z., *Hikayat Tanah Hitu* (Leiden: Proefschrift, 1977), hlm. 19.

<sup>11</sup> Saleh Putuhena, "Beberapa Pokok", hlm. 4.

berada di bagian selatan (bawah) pulau. Pola seperti ini juga terdapat di Maluku Utara dengan nama *Soa Siu* (gabungan sembilan *Soa*) yang menempati daerah pesisir bawah, sedangkan *Soa Nyagimoi* (gabungan sepuluh *Soa*) mendiami daerah pedalaman.<sup>12</sup> Adapun untuk Maluku Tenggara dikenal dengan sebutan *Ur Lim* dan *Ur Siu*.<sup>13</sup> Menariknya, walaupun masyarakat Maluku mendiami daerah kepulauan yang cukup luas, tapi pandangan kosmologi yang monodualistik ini mencakup semua wilayah, walaupun dengan penyebutan yang berbeda.

Semangat monodualistik ini menjadi akar budaya masyarakat Maluku, didalamnya mengandung nilai-nilai kekerabatan, persaudaraan, kesetaraan, dan nilai-nilai pluralisme. Sebagaimana yang tercermin dalam budaya *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, dan sebagainya.

#### **B. Bentuk-Bentuk Persaudaraan Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku**

Semangat monodualistik *Siwalima* yang merupakan akar budaya masyarakat Maluku telah menjadi dasar untuk membangun kerukunan dan persaudaraan di Maluku. Bentuk-bentuk persaudaraan dalam budaya Maluku sangat menghargai perbedaan, baik itu suku, agama maupun golongan. Apapun perbedaan itu tetap dianggap sebagai saudara, yang dalam istilah lokal Maluku disebut sebagai *Orang Basudara* (orang yang bersaudara). Filosofi hidup *Orang Basudara* itu adalah “potong di kuku, rasa di daging”, serta “ale rasa, beta rasa” (kamu rasa, saya juga rasa). Persaudaraan ini bersifat pro-eksistensi, karena sama-sama merasa memiliki dan punya tanggung jawab terhadap yang lain.

Keunikan dan keindahan nilai-nilai persaudaraan seperti yang disebutkan di atas, pernah menjadikan Maluku sebagai ikon perdamaian di Indonesia, bahkan di dunia. Pengakuan terhadap Maluku sebagai ikon perdamaian tersebut karena peran budaya lokal dalam membina persaudaraan dan perdamaian di Maluku. Walaupun pada saat konflik 1999-2004, peran budaya lokal Maluku dipertanyakan perannya, namun fakta sosial juga menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian yang spektakuler yang sudah dicapai dewasa ini tidak bisa dilepaskan

---

<sup>12</sup> Frassen Ch. F. Van, “Types of Sociopolitical Structure in North Halmahera”, *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Jilid 8, No. 2, November 1978/1979, hlm. 90

<sup>13</sup> David Howes, *On The Odour*, hlm. 105.

dari begitu besarnya peran budaya lokal dalam proses rekonsiliasi dan integrasi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk persaudaraan masyarakat Maluku tersebut antara lain:

**a. Pela**

Pela berasal dari bahasa setempat dari kata 'pelau' yang berarti 'saudara laki-laki'. Secara terminologis diartikan sebagai ikatan persahabatan

Pela berasal dari bahasa setempat dari kata 'pelau' yang berarti 'saudara laki-laki'. Secara terminologis diartikan sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dihubungkan di antara seluruh masyarakat pribumi dari dua negeri atau lebih ikatan tersebut. Pela telah terbentuk dan ditetapkan sejak nenek moyang mereka dalam keadaan yang khusus dan menyertakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Pela merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku, khususnya di Maluku Bagian Tengah, seperti di pulau Seram, Ambon, Lease, dan Buru sangat terkenal di Nusantara bahkan dunia. Nilai budaya yang terkemas dalam Pela ini sering menjadi contoh kerukunan di Indonesia. Ketika orang berbicara tentang model kehidupan kebersamaan dan toleransi, para pemimpin sering memberi contoh kerukunan hidup dalam tradisi Pela Gandong.

Pela juga berhubungan dengan Kakehan, yakni tradisi 'perburuan kepala' (*head hunter*) manusia yang ada masa masyarakat suku-suku Maluku terdahulu, yang mungkin saja di antara kelompok itu saling bermusuhan untuk mencari 'kepala' dari masing-masing anggota suku musuh, kemudian mereka dalam kondisi tertentu bersepakat mengikat janji untuk tidak saling menyerang, sebaliknya harus saling melindungi. Ada juga pela terbentuk karena adanya bantuan yang diberikan oleh salah satu negeri atau desa kepada desa yang lain. Dari situlah mereka saling berjanji dan bersumpah untuk menjalin persaudaraan yang dikenal dengan *Pela*.

Ikatan perjanjian ini kemudian memosisikan kedua belah pihak sebagai pela atau 'saudara laki-laki'. *Kakehan* merupakan suatu organisasi rahasia, yang dibentuk untuk membina kemampuan fisik dan magis seseorang.

Ada beberapa bentuk pela. Pertama, adalah pela tuni/pela darah. Pela jenis ini termasuk pela keras. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban dalam jenis pela ini sangat ketat dan dipegang serta diikuti. Perjanjian darah ini dilakukan dengan cara meminum darah yang berasal

dari jari-jari tangan para pemimpin negeri. Sebelum daerah diminum, dimasukan kedalam gelas, kemudian ujung senjata pemimpin itu dicelupkan ke dalam gelas. Proses minum darah ini dilakukan secara sakral dalam sebuah upacara adat.

Pela ini memberi pantangan kepada warga negeri-negeri yang memiliki hubungan pela darah untuk menikah satu dengan yang lain. Sebaliknya, mereka yang tergabung dalam ikatan pela ini diwajibkan untuk saling membantu dan melindungi.

Kedua adalah pela tempat sirih. Jenis pela ini termasuk ketegori lunak. Pela ini pembentukannya tidak ditetapkan melalui sumpah. Aturan berupa hak dan kewajiban di antara yang ber-pela tidak begitu ketat. Hanya saja kewajiban saling membantu dan melindungi diterapkan juga secara bersama.

Semangat budaya *pela*, baik *pela darah* maupun *pela tempat sirih* adalah pengakuan dan penerimaan antara sesama manusia, yang meskipun berbeda agama dan negeri, namun tidak menghalangi mereka untuk mengangkat diri sebagai *orang basudara*. *Pela* membangun hak dan kewajiban untuk saling mengisi dalam kekurangan, dan berbagi dalam kelebihan.

Pada sebagian besar negeri-negeri di Maluku Tengah dan Kota Ambon setiap negeri memiliki ikatan *pela* dengan salah satu negeri lain. Kebanyakan hubungan ini terjadi antara satu negeri yang beragama Islam dengan negeri yang beragama Kristen. Kemungkinan terbentuknya hubungan *pela* ini sebelum masuknya agama ke Maluku.

Contoh hubungan *pela* pada negeri Islam dengan negeri Kristen, seperti Haria (Kristen) dengan Siri Sori (Islam), atau *pela* Batu Merah dan Paso.

*Pela* dan *gandong* seringkali dimaknai secara keliru dalam konsepsinya. Ada kalanya penggunaan *pela* dan *gandong* digunakan secara bersamaan, atau dianggap memiliki konotasi makna yang sama dalam satu pengertian. Padahal *pela-gandong* adalah dua keadaan dan nilai budaya yang memiliki pengertian berbeda dalam perspektif sosio-antropologis.

Bertolak dari budaya pela yang dibahas di atas pada hakekatnya merupakan modal sosial kultural yang sangat penting untuk membangun persaudaraan sejati. Nilai-nilai universal yang ada dalam budaya pela ini seperti persaudaraan dan kemanusiaan, walaupun tidak memiliki ikatan darah selama ini menjadi ikon perdamaian dan persaudaraan di Maluku dapat

ditransformasikan sebagai kekuatan integrasi pelbagai lapisan masyarakat yang bukan hanya orang asli Maluku, tetapi juga masyarakat dari luar Maluku dengan pelbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya dan agama.<sup>14</sup>

### b. Gandong

Gandong merupakan bentuk ikatan persaudaraan atau persahabatan yang terbentuk karena adanya ikatan genologis. Gandong berasal dari "kandung" yang menyiratkan persaudaraan berdasar garis turunan.

Dalam kehidupan masyarakat awal, setelah terbentuk komunitas satu gen (keluarga), biasanya mereka berpencar mencari tempat pemukiman baru. Keadaan ini sesuai sifat hidup masyarakat tradisional yang suka berpindah-pindah (*nomaden*), karena menyesuaikan diri dengan alam dan kebutuhannya. Pada saat itu, masyarakat sangat tergantung pada alam, karena belum bisa mengelola alam dan lingkungan seperti jaman moderen. Pencarian seperti ini kemudian berakibat pada berpencarnya keturunan atau genetic komunitas tersebut ke beberapa *uli/hena* baru. Di tempat yang baru mereka menetap dan membentuk masyarakat yang kemudian berkembang menjadi *aman* (negeri).

Dalam perkembangan selanjutnya, kesamaan asal-usul tersebut membuat mereka bersepakat hidup selayaknya saudara kandung, meskipun mereka berbeda agama.

Mereka bersepakat saling melindungi dan saling membantu dalam ungkapan *darah satu darah samua, hidup satu hidup samua*. Pengertian bebas dari ungkapan ini adalah, "*darah kamu adalah juga darahku dan darah kita semua, hidup kamu adalah juga hidupku dan hidup kita semua*".

Bila *pela* hanya menyiratkan persahabatan antara dua desa, maka *gandong* lebih luas cakupannya. Karena *gandong* bisa mencakup lebih dari dua desa. Contohnya adalah antara lain: *negeri Siri-sori* (Islam) dan *Siri-Sori Serani* (Kristen) di Kecamatan Saparua di Maluku Tengah dan *negeri Tamilow* (Islam) di Kecamatan Seram Selatan yang ber-*gandong* dengan Negeri Hutumuri (Kristen) yang berada di Kecamatan Teluk Ambon Baguala di Kota Ambon. Contoh

---

<sup>14</sup>Ridwan, Patty, Raja Negeri Latu, 38 Tahun. *Wawancara*, 17 November, 2011, serta Jhon, Pattisahusiwa, Raja Negeri Siri Sori Islam, 59 Tahun. *Wawancara*, 22 November 2011.

yang lain yaitu hubungan Gandong antara negeri Latu-Hualoy di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan negeri Aboru, Kariuw dan Booy di Kabupaten Maluku Tengah. Bentuk lain dari Gandong ini di Seram dikenal dengan hubungan *Wariwa*, yaitu *Wari* adalah adik dan *Wa* adalah kakak, contohnya hubungan *Wariwa* negeri Hunitetu sebagai *Wari* (adik) dan negeri Latu sebagai *Wa* (kakak)

Dari sejarah lisan yang ada, ketiga negeri ini memiliki kesatuan asal usul dan nenek moyang mereka adalah kakak-beradik yang datang dari Seram Utara. Ikatan persaudaraan yang sama (*gandong*) juga terjadi antar *negeri* Seith (Islam) di Pulau Ambon dengan Ouw (Kristen) di Saparua. Demikian pula dengan Negeri Latu dan Hualoy (Islam) di Pulau Seram dengan Aboru, Boi dan Kariu (Kristen) di Pulau Haruku.

Negeri Seith dan Booy yang satu *gandong* ini sudah seringkali melakukan upacara *panas gandong*. Terakhir kegiatan *panas gandong* dilakukan kedua negeri pada tahun 2005 untuk kembali memperkokoh hubungan persaudaraan setelah Maluku dilanda konflik tahun 1999-2002, dan negeri-negeri ini tidak sempat menjalin komunikasi secara normal.

Dalam tradisi masyarakat yang memiliki hubungan *gandong* dan seperti juga *pela*, sangat menanggung malu bilamana kerja-kerja sosial satu *negeri* tidak dibantu oleh *negeri* lain. Sikap tidak ikut membantu hajatan negeri ini, dipandang sebagai kesalahan dan aib besar. Bahkan ada tradisi yang dipercaya bahwa mereka akan mendapatkan laknat dan musibah dari nenek moyang mereka.

Begitu kuatnya budaya Gandong ini terletak pada nilai-nilai universal yang ada di dalamnya, antara lain persaudaraan, kebersamaan dan pengorbanan. Perasaan dan kesadaran memiliki ikatan darah walaupun berbeda agama dan negeri, tetapi tetap harus terus menjaga persaudaraan. Kebersamaan itu selalu diwujudkan dalam kehidupan, jika salah satu punya hajatan negeri, *gandongnya* siap membantu. Dengan semangat orang basudara (persaudaraan) ini pula yang membuat hubungan *gandong* ini juga siap berkorban untuk yang lain. Bahkan dapat dikatakan hubungan *gandong* ini bersifat pro-eksistensi, sengan semboyan “potong di kuku rasa di daging”, atau, “ale rasa beta rasa”. ( kamu rasa, saya juga rasa).

### c. Famili (Marga)

*Famili* adalah hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan marga/*fam*. Tradisi masyarakat Maluku menempatkan marga (*lumah tau*) sebagai keluarga inti. Satu marga sesungguhnya adalah satuan keluarga inti.

Marga atau *fam* yang sama bisa tersebar ke berbagai *negeri* baik dalam bentuk *fam* yang sama atau dengan sedikit perubahan fonemik (penyebutan atau lafal). Namun *fam* ini mengindikasikan bahwa mereka adalah satu keluarga inti.

Jejaring konsep *famili* ini marga Pelupessy tidak hanya terdapat di *negeri* Siri Sori Islam, namun ada juga di Ouw (Kristen), atau marga Patty di Latu juga terdapat di Saparua.

Dalam tradisi *family* ini terdapat kearifan yang sudah terpatri sejak lama. Misalnya kebiasaan saling mengunjungi pada setiap hari Natal atau pun Idul Fitri. Toisuta yang Muslim misalnya mengunjungi *family*-nya Toisuta yang Kristen pada hari raya Natal. Demikian pun sebaliknya Toisuta yang Kristen sering berkunjung kepada saudara Toisuta yang muslim pada hari raya Idul Fitri.

Selain itu di negeri-negeri Kristen biasanya menyimpan perkakas rumah tangga yang khusus diperuntukkan untuk suatu saat menerima kunjungan *pela*, *gandong* atau *famili*-nya yang muslim, seperti wajan, panci, cangkir, piring dan sebagainya. Penyiapan perkakas muslim seperti ini oleh *basudara* Kristen adalah berdasarkan anggapan bahwa, terdapat larangan bagi orang Islam untuk mengkonsumsi makanan tertentu sehingga perkakas tersebut tidak boleh tercemari, sehingga dikhususkan untuk saudaranya yang *salam* atau muslim.

Pola hidup saling membantu dalam konteks *basodara* berdasar *family* ini tidak seperti yang ada dalam *pela* dan *gandong*. Dalam sistem *family*, persaudaraan lebih terbatas dan sedikit tertutup. Namun hubungan kekeluargaan ini terasa kuat karena di antara mereka yang memiliki kesamaan marga tersebut merasa menjadi satu keluarga inti.<sup>15</sup>

Sebagaimana budaya *pela* dan *gandong*, nilai-nilai universal yang dapat dipetik dari budaya *family* ini adalah nilai persaudaraan dan kebersamaan. Merasa punya ikatan persaudaraan

---

<sup>15</sup>Jhon, Pattisahusiwa, Raja Negeri Siri Sori Islam, 59 Tahun. *Wawancara*, 21 November 2011, serta Ridwan, Patty, Raja Negeri Latu, 38 Tahun. *FGD*, 16 November 2011

yang harus selalu dipelihara, serta hidup saling membantu, walaupun memiliki latar belakang agama dan negeri yang berbeda.

### C. Revitalisasi Budaya Lokal

6

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa *Siwalima*, merupakan akar budaya masyarakat Maluku, terkandung di dalamnya nilai persatuan. Di balik cerita sukses dari peran budaya lokal dalam membina serta membangun perdamaian dan persaudaraan di Maluku, baik sebelum konflik, saat konflik, dan pascakonflik, terdapat juga proses proses pelemahan dan penghancuran. Sebagai contoh, proses pelemahan dan penghancuran spirit *Siwalima* tersebut telah terjadi sejak masa kolonialisme serta pembangunan pada pascakemerdekaan yang tidak mengakomodasi multikulturalisme Indonesia. Penghancuran budaya lokal ini berakibat pada rusaknya tatanan hidup masyarakat yang bersifat kolejal bahkan menjadi salah satu akar konflik dalam masyarakat. Konflik yang terjadi di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, merupakan salah satu akibat dari hancurnya budaya lokal. Karena itu, proses rekonsiliasi dan *recovery* pascakerusuhan sosial di Maluku Tengah sangat membutuhkan upaya-upaya revitalisasi dan transformasi budaya, mengingat konflik dan kekerasan pada masa lalu telah meninggalkan sejumlah masalah yang cukup kompleks.

Pada sisi yang lain, realisme-sosial menunjukkan bahwa cerita sukses proses rekonsiliasi dan *recovery* Maluku pascakonflik 1999-2004 tidak terlepas dari upaya revitalisasi dan transformasi budaya lokal. Karena itu, jika proses pembangunan perdamaian sejati di Maluku masa depan tidak disertai dengan revitalisasi dan transformasi budaya akan berdampak pada dua hal. Pertama: hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat serta makin berkembangnya tradisi kekerasan. Sebab pascakerusuhan upaya pemulihan masyarakat dari trauma serta stigma akibat konflik belum berjalan secara baik. Kekerasan serta kecurigaan terhadap sesama telah menjadi masalah sosial yang cukup serius, di antaranya masalah segregasi sosial. Kedua: Sebagai wilayah memiliki sosial yang makin plural

dan kompleks, serta sistem pemerintahan lokal yang sangat banyak, yaitu kurang lebih 300 raja pada desa-desa adat (negeri) bisa memunculkan primordialisme sempit. Karena itu proses revitalisasi dan transformasi budaya sebagai kekuatan reintegrasi sosial merupakan kebutuhan mendesak untuk dilakukan.

Peranan budaya di dalam mengatur tatanan hidup masyarakat telah ada jauh sebelum kehadiran agama-agama di Maluku, yang disebut sebagai nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*). Pola relasi sosial, interaksi, dan sosialisasi kehidupan masyarakat diatur dan tertata atau terjalin berdasarkan seperangkat nilai-nilai yang melembaga dalam ikatan-ikatan sosial (*social bonds*) yang dipedomani secara ketat. Sangat sulit untuk ditemukan atau memang tidak ada catatan sejarah yang pasti dan representatif untuk bisa dirujuk guna mengetahui sejak kapan konstruksi relasi sosial model ini terbentuk dan menjadi aturan atau tatanan sosial masyarakat Maluku. Dapat saja diasumsikan bahwa relasi sosial ini muncul bersamaan dengan kehadiran atau semenjak masyarakat Maluku ada dan kemudian terwariskan dan berkembang dari generasi ke generasi.<sup>16</sup> Asumsi ini menjadi relatif lebih kuat karena: *pertama*, secara terminologis kata-kata yang digunakan untuk mengartikulasi nilai-nilai tatanan relasi sosial dimaksud berakar dan berkarakter khas Maluku, dan *kedua*, bahwa kandungan nilai-nilainya juga dalam batas-batas tertentu mengindikasikan perbedaan-perbedaan tertentu dari daerah-daerah lain.

Secara kontekstual, tata relasi sosial ini merupakan sebuah instrumen yang efektif, fungsional, dan berkontribusi signifikan mendorong terjadinya dinamika proses sekaligus menjadi kontrol dan memberikan jaminan kenyamanan bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat Maluku.

Dikatakan demikian, karena pada kenyataan dan faktanya masyarakat Maluku sampai hari ini masih ada dan tetap mengapresiasi nilai-nilai yang mengikat tata relasi mereka.<sup>17</sup>

Hal yang menarik untuk dicermati dan ditelaah lebih dalam dari fokus persoalan ini adalah bahwa dalam proses perkembangan nilai-nilai ini akhirnya mengalami penguatan dan melembaga ke dalam fakultas mentalitas dalam bentuk sebuah kesadaran berbudaya (*cultural awarness*) dan menjadi kekuatan sosial (*social capital*) bagi masyarakat Maluku untuk bertumbuh dan berkembang. Kesadaran budaya dan kekuatan sosial ini jugalah yang bertransformasi menjadi kekuatan sinergis dari dan bagi kehidupan masyarakat Maluku. Apresiasi dan ekspresi masyarakat Maluku terhadap kesadaran berbudaya pada kerangka praksisnya termanifestasi dalam bentuk cara berpikir, bersikap dan bertindak mereka yang khas. Dari kondisi ini masyarakat Maluku dapat mengidentifikasi diri sebagai sebuah komunitas sosial yang memiliki identitas tersendiri dan berbeda dari komunitas-komunitas sosial lainnya di Indonesia.

Gambaran di atas merupakan potret eksklusif tentang proses bertumbuh dan berkembangnya sebuah realitas sosial budaya masyarakat Maluku. Dengan kata lain, penggambaran dimaksud lebih mewakili kondisi “*virginitas*” tata relasi sosial atau budaya masyarakat Maluku sebelum berjumpa dengan nilai-nilai agama dan budaya yang datang dari luar Maluku seperti Islam dan Kristen yang datang bersama budaya Arab dan budaya Eropa. Proses perjumpaan ini di satu sisi memperkaya nilai-nilai kearifan lokal yang ada, tetapi di sisi yang lain menciptakan ruang-ruang segregasi sosial di dalam masyarakat. Dimana konflik Islam dan Kristen pada perang Salib atau Sabil serta kolonialisme Barat yang

---

<sup>17</sup> Budaya Pela dan Gandong mengisyaratkan bagaimana sebuah relasi sosial dibutuhkan untuk membangun kenyamanan antar dua komunitas dengan latar belakang berbeda. Budaya ini oleh cukup banyak kalangan dinilai sudah memfosil pascakonflik Maluku terakhir (1999-2002). Penilaian ini ternyata tidak cukup beralasan untuk dibenarkan. Oleh karena kenyataan pascakonflik menunjukkan besarnya hasrat masyarakat Maluku untuk menggandakan relasi sosial Pela dan Gandong sebagai media penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Lihat, Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso* (Jakarta: ICIP, Cet. I, 2007), hlm. 164-165. Lihat juga, John Ruhlessin, *Pluralisme Berwajah Humanis*, Cet. I (Ambon: LESSMU, 2007), hlm. 209-210.

masuk ke Maluku, khususnya Portugis dan Belanda turut mempengaruhi nilai-nilai persatuan yang ada dalam masyarakat. Terjadilah polarisasi kebudayaan dan segregasi, umat Islam Maluku identik dengan Arab dan umat Kristen Maluku identik dengan Barat (Eropa).

Kehadiran agama-agama dan budaya-budaya dari luar Maluku telah membuka sebuah fase sejarah tersendiri yang relatif sangat memengaruhi corak berbudaya masyarakat Maluku.<sup>18</sup> Dari proses perjumpaan ini, kebudayaan Maluku memasuki dan mengalami sebuah fase terjadinya gesekan dan akulturasi budaya. Konsekuensinya, masyarakat Maluku akhirnya dihadapkan pada opsi-opsi budaya baru dalam mengatur tata relasi sosial, sosialisasi dan interaksi masyarakat Maluku. Untuk memahami konteks persoalan ini, Petter L. Berger memberikan pandangan menarik tentang relasi manusia dan masyarakat dengan segala pranatanya sebagai berikut.

Masyarakat adalah suatu gejala dialektik, yaitu suatu hasil manusia dan hasil daripada manusia lain, tetapi terus-menerus memengaruhi kembali penghasilannya. Masyarakat adalah produk manusia. Ia tidak memiliki adanya selain yang diberikan oleh aktivitas dan kesadaran manusia. Tidak ada kenyataan sosial lepas dari manusia. Tetapi, dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah hasil masyarakat. Biografi setiap individu adalah suatu episode dalam sejarah masyarakat yang mendahului dan melestarikannya. Masyarakat sudah ada sebelum individu dilahirkan dan tetap ada sesudah individu mati. Di dalam masyarakat dan sebagai hasil proses sosial, individu menjadi seorang pribadi, memiliki dan mempertahankan suatu identitas, menjalankan berbagai perencanaan dalam hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sebaran agama-agama di Indonesia pada masa kerajaan dan model pemerintahan tradisional (adat) berjalan dengan cara apa yang oleh Nock disebut adhe<sup>15</sup> yaitu konversi ke dalam Islam tanpa meninggalkan praktik keagamaan yang lama. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Jaringan Lokal Islam Nusantara*, Cet. 1 (Bandung : Miz<sup>11</sup> 2002), hlm. 18-21.

<sup>19</sup> Petter L. Berger, *The Sacred Canopy*, Doubleday, Garden City, New York, 1967, hal. 3. Relasi manusia dan masyarakat adalah sebuah relasi antara manusia dengan kebudayaan. Masyarakat dengan segenap perangkat sosialnya merupakan relitas kebudayaan yang berhadapan dengan setiap individu sejak dia lahir sampai bertumbuh dan berkembang sampai datang saat kematiannya. Masyarakat sebagai sebuah entitas menawarkan nilai, tradisi, dan kebudayaan kepada manusia. Oleh karena itu perjumpaan antarmasyarakat dengan berbagai latar belakang meniscayakan terbukanya sebuah ruang interaksi dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang berbeda. Perjumpaan seperti inilah yang menyebabkan manusia mengalami proses mengambil sikap, pendirian dan berperilaku yang “menyimpang” dari tradisi dan kebudayaan masyarakatnya sendiri. Proses ini juga yang mengakibatkan sebuah identitas masyarakat dan kebudayaan termodifikasi atau lenyap. Relasi semacam ini oleh M. Sastrapratedja disebut sebagai dialektika manusia dan masyarakat, yaitu fase eksternalisasi, fase objektivasi, dan fase internalisasi. Melalui fase eksternalisasi manusia berekspresi untuk membangun dunianya, yaitu masyarakat sebagai entitas. Masyarakat kemudian menjadi sebuah objek yang terpisah dari manusia pada fase objektivasi. Dan akhirnya, pada fase internalisasi masyarakat sebagai entitas diserap kembali oleh masyarakat.

Kemunculan opsi-opsi budaya lain dimaksud tidak cukup dipahami *an sich* sebagai hasil dari proses akulturasi budaya masyarakat Maluku dan budaya lainnya. Akan tetapi, kemunculan opsi-opsi budaya tersebut juga harus dipahami sebagai proses negosiasi ideologi, ekonomi, dan politik antara masyarakat Maluku dengan para pendatang atau "orang dagang".<sup>20</sup> Opsi-opsi budaya tersebut sesungguhnya adalah sebuah akumulasi antara kebutuhan dan kepentingan dari pihak-pihak yang hendak melakukan perluasan wilayah kekuasaan, yaitu ideologi, ekonomi, dan politik secara bersamaan.

Proses gesekan dan akulturasi budaya berikut dampak konsekuensial yang ditimbulkannya tidak serta merta dipersepsikan cenderung negatif atau positif saja. Akan tetapi, proses tersebut dalam batas-batas tertentu di samping memberi kontribusi positif, juga negatif. Hal ini merupakan sebuah proses sosialisasi dan interaksi yang normal dari perjumpaan budaya dan karena itu tidak bisa dihindari. PerSoalannya ketika proses gesekan dan percampuran antarbudaya tersebut berujung pada penghancuran budaya-budaya lokal.

Dalam konteks budaya Maluku kontribusi positif dan negatif dengan mudah dan sangat jelas dapat diidentifikasi, mulai dari model mengenakan pakaian sampai cara berbahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian dan berbahasa masyarakat Maluku relatif banyak dipengaruhi oleh budaya luar Maluku, yakni Portugis, Belanda dan Arab. Bahkan, dari identifikasi ini mengakibatkan kemunculan stempel pengiripan atau pengidentikkan. Orang Maluku yang berlatar belakang beragama Kristen identik dan diasosiasikan berbudaya Belanda. Sementara, orang Maluku yang beragama Islam diidentifikasi atau diasosiasikan berbudaya Arab. Proses identifikasi ini sekaligus menimbulkan polarisasi di dalam kehidupan umat beragama di Maluku, yaitu Belanda atau Barat adalah Kristen dan Arab adalah Islam. Konstruksi yang terpolarisasi seperti ini menggeser persaudaraan kultural sebagai orang Maluku.

---

<sup>20</sup> Orang dagang adalah sebutan bagi orang pendatang dari luar Maluku.

Karena identitas Belanda atau Barat yang telah melekat pada orang Kristen Maluku dan identitas Arab yang telah melekat pada orang Islam Maluku telah menciptakan stigmatisasi dan segregasi di dalam masyarakat

Sebagaimana telah disebutkan pada bab ketiga bahwasanya penghancuran budaya masyarakat Maluku Tengah sudah berlangsung sejak zaman kolonial (Portugis, Belanda dan Jepang) kemudian pada zaman kemerdekaan RI, melalui regulasi-regulasi pemerintah yang tidak akomodatif terhadap eksistensi budaya lokal. Penghancuran budaya masyarakat Maluku ini secara otomatis telah melemahkan solidaritas sosial, seperti budaya *Pela, Gandong, Larvul Ngabal* dan sebagainya.

Salah satu kebijakan politik pemerintah pemerintah RI yang punya peranan besar terhadap hancurnya pranata-pranata adat tersebut ialah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5/1979 yang mengatur tata pemerintahan desa. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk penyeragaman budaya yang bertentangan dengan semangat multikulturalisme. UU ini berkontribusi kuat terhadap proses penghancuran sistem-sistem pemerintahan lokal di Maluku. Struktur pemerintahan negeri dirubah menjadi desa dan kelurahan, pimpinan negeri yang disebut raja diganti dengan istilah lurah atau kepala desa yang sangat bernuansa Jawa. Perubahan-perubahan ini diikuti dengan penerapan berbagai macam perangkat peraturan pemerintah lainnya yang menawarkan kultur baru. Perubahan sistem pemerintah lokal dari negeri ke desa dan kelurahan ini bukan hanya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa atau kelurahan tersebut, tetapi juga secara perlahan merubah tatanan budaya yang ada di dalam masyarakat setempat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua, bahwa sistem pemerintahan lokal di Maluku pada tingkat negeri, terbentuk dari sebuah proses yang dimulai dari struktur terkecil, yaitu keluarga. Kumpulan dari beberapa rumah tangga dalam satu keluarga membentuk satu *Rumatau* atau *Lamatau*. Dengan kata lain kesatuan kelompok genealogis yang lebih besar sesudah keluarga adalah *Rumatau* atau

<sup>2</sup> *Lamatau*. *Rumatau* merupakan sel induk bagi terbentuknya masyarakat di Maluku Tengah. Setiap orang terhimpun dalam salah satu *Rumatau*. Mereka yang tidak termasuk dalam salah satu *Rumatau* sukar untuk turut serta di dalam mekanisme hukum serta kurang mendapat perlindungan hukum. *Rumatau* adalah simbol kebanggaan anggotanya. Siapa yang berada di luarnya berarti kehilangan identitas dan martabat asal kulturalnya.

<sup>2</sup> Untuk mengatur urusan suatu *Rumatau*, baik dalam hubungan ke dalam atau kepada pihak luar seperti *Rumatau* lainnya, maka diangkatlah salah seorang dari anggota *Rumatau* yang bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar *Upu*. Umumnya *Upu* dipilih dari anggota yang tertua atau yang dituakan di antara anggota *Rumatau*. Senioritas seseorang memegang peranan penting untuk dapat diangkat menjadi *Upu*. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh seorang pemimpin yang berwibawa.

*Rumatau-Rumatau* berkembang menjadi susunan masyarakat yang dikenal dengan istilah *Soa*. *Soa* terdiri dari satu atau beberapa *Rumatau* dan biasanya mempunyai satu marga, karena masih memiliki hubungan geneologis, misalnya *Soa* dari marga Wakano, *Soa* dari marga Patty, *Soa* dari marga Sahetapy, *Soa* dari marga Pattimura, dan lain-lain. Masing-masing *Soa* memiliki satu kepala *Soa*, yang biasa disebut *Iro*.<sup>21</sup> Selain *Soa*, kumpulan *Rumatau* juga membentuk satu kampung yang disebut *uku*. *Uku* ini dipimpin oleh seorang *Tamataela*. Jabatan sebagai *Tamataela* dijabat oleh orang yang tertua di dalam *Rumatau* tua. Konsekuensinya orang-orang yang berasal dari *Rumatau-Rumatau* baru atau pecahan harus tunduk kepadanya, tidak boleh melangkahnya karena takut mendapat kutukan dan murka para moyang (nenek moyang)<sup>22</sup>. Ada pula bentuk kuno dari negeri atau yang biasa disebut negeri lama. Sebelum berubah menjadi negeri-negeri lama ini disebut *Aman* atau *Hena*. Biasanya *Aman* atau *Hena* ini terletak di belakang negeri. Karena kebijakan Belanda maka *Aman* atau *Hena* ini dipindahkan

---

<sup>21</sup> *Iro* adalah kepala *Soa*. Kata *iro* sendiri diambil dari kata *uru* yang berarti kepala

<sup>22</sup> Dalam budaya Maluku, khususnya di Maluku Tengah, kata *moyang* adalah sebutan bagi para nenek moyang. Arwah para nenek moyang itu disebut sebagai *nitu* atau *nituo*. Kesalahan atau Pelanggaran hukumannya selalu dihubungkan adanya ancaman kutukan dari moyang atau *nitu* para nenek moyang.

rata-rata ke daerah pesisir pantai, kemudian berubah nama menjadi negeri. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja.<sup>23</sup>

Proses pembentukan negeri di atas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan negeri merupakan manifestasi dari rasa kebersamaan yang cukup kuat. Ikatan-ikatan solidaritas secara kultural tersebut dapat dilihat dari proses pembentukan negeri hingga struktur pemerintahan negeri yang di atas. Pada setiap rumah tangga terdapat seorang kepala rumah tangga, yang dalam kultur Maluku dipimpin oleh bapak, yang disebut Upu. Kemudian *Rumatau* juga memiliki seorang pemimpin yang bergelar *Upu*, yang merupakan kumpulan satu keluarga. Kemudian dari *Rumatau* terbentuk satu *Soa*, yang dipimpin oleh seorang kepala *Soa* yang bergelar *Iro*. Kepala *Soa* inilah kemudian yang akan menjadi perwakilan di dalam badan Saniri, yang sekarang dikenal dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Tugas saniri negeri adalah, merumuskan program kerja negeri dalam satu tahun, mendengar laporan keuangan raja, dan menetapkan raja, yang diusulkan marga raja (parintah). Pada setiap negeri terdapat *Soa* parintah atau marga parintah, yaitu marga yang diakui secara adat untuk memimpin negeri tersebut. Dalam sistem pemerintahan negeri tidak ada pemilihan, tetapi langsung ditetapkan oleh saniri setelah diusulkan oleh marga parintah yang ada.

Sedangkan dalam proses pengangkatan lurah dan kepala desa menggunakan cara berbeda dan tidak lazim dalam perspektif budaya lokal, secara otomatis merusak sistem sosial (*local knowledge*) dan budaya masyarakat. Posisi seorang pimpinan negeri atau raja yang dalam struktur sosial lokal masyarakat Maluku akhirnya tidak lagi mendapat legitimasi masyarakat, tetapi pemerintah, sehingga ketaatan masyarakat pun sangat bersifat normatif, raja kehilangan kewibawaan. Dengan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979, proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan konflik di dalam masyarakat desa. Sebuah pergeseran demokrasi yang luar biasa. Budaya masyarakat yang

---

<sup>23</sup> H.M. Saleh PutuHena dkk, *Sejarah dan Kearifan Hidup Masyarakat Maluku Bagian Tengah*, (Ambon: PS2BM dan PTD, 2009), hlm. 55-57.

biasanya sangat rukun dan kolegal berubah menjadi sangat konflikual. Solidaritas kultural berubah menjadi solidaritas politik yang sarat intrik dan kepentingan. Bahkan proses pemilihan kepala desa sering kali melibatkan kepentingan politik di level kabupaten dan provinsi. Para calon kepala desa sering mencari dukungan politik dan finansial dari bupati dan gubernur atau calon bupati dan calon gubernur, atau sebaliknya—agar supaya ada kontrak politik untuk saling mendukung, yaitu jika calon kepala desa tersebut terpilih dia secara otomatis mendukung calon bupati atau gubernur tersebut.

Secara instruksional juga seorang raja tidak lagi menjadi figur sosial yang menempati posisi tertinggi dalam sistem pemerintahan lokal, akan tetapi telah menjadi bagian dari sebuah sistem pemerintah yang lebih besar, mulai dari kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memperhentikannya, yakni bupati/walikota melalui camat, dan bukan kepada masyarakat yang memilihnya.<sup>24</sup>

Intervensi ini tidak saja merusak sistem pemerintahan lokal, tapi yang lebih dari pada itu bahwa intervensi ini merusak bangunan relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Seorang lurah atau kepala desa yang diangkat melalui mekanisme pemerintah cenderung tidak didengar oleh masyarakat. Justru sebaliknya, seorang raja lebih didengar. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan lurah/desa atau negeri. Secara simbolis seorang lurah atau kepala desa adalah seorang kepala pemerintahan di level lurah atau desa. Pada saat yang bersamaan seorang raja juga merupakan seorang

---

<sup>24</sup> Pasal 10 ayat 2.a UU No. 5/1979. Pada pasal 3 dari UU ini juga mengatur bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). LMD adalah lembaga untuk pengambilan keputusan melalui musyawarah di tingkat desa dan bukan lembaga kontrol terhadap pemerintah di tingkat desa. Proses penyeragaman ini kemudian diikuti dengan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor: 28/1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/1981 yang mengatur penyeragaman lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ke dalam bentuk LKMD. Sebuah lembaga yang pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengatur Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa. Lembaga yang oleh Hans Antlov disebut sebagai *undemocratic institution* ini terdiri atas kumpulan elite desa yang dekat dengan kepala desa. Dalam tata cara pembentukan pengurus lembaga ini juga, para anggotanya harus mendapat persetujuan dari kepala desa, camat dan bupati/walikota untuk disahkan. Lihat Heru Cahyono, *Konflik Elite Politik di Pedesaan*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2-4. Lihat juga Dadang Juliantara, "Penguatan Otonomi Desa Membangun Demokrasi Desa", dalam *Mebah Watak Negara* oleh Purwo Santoso, dkk., Cet. I (Yogyakarta: LAPPERA, 2002), hlm. 19-20. Penyeragaman lembaga secara otomatis menjadi sebuah lembaga tandingan dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan atau lembaga-lembaga adat di Maluku.

pemimpin negeri. Masyarakat kemudian tersegregasi dalam dualisme pemerintahan ini dan dalam banyak kasus konflik-konflik sosial muncul karena alasan dikotomi kepentingan yang berbeda, biasanya dalam bentuk antara kepentingan budaya dan kepentingan pemerintah.

Intervensi kebijakan pemerintah dan masuknya berbagai kepentingan politik penguasa ke dalam ruang-ruang pemerintahan lokal telah menyebabkan ikatan-ikatan sosial budaya lokal masyarakat Maluku terdistorsi dan secara perlahan. Nilai-nilai kearifan hidup untuk saling tolong-menolong, membantu dan bekerja sama seperti *Ma'anu*, *Badati* dan secara perlahan mulai ditinggalkan digantikan dengan pola kehidupan yang *Masohi* individualis dan materialis. *Sasi* sebagai sebuah budaya untuk meningkatkan produktivitas dan proteksi terhadap alam, melalui institusi *Kewang* secara perlahan mulai dilupakan, ditandai dengan eksploitasi sumber-sumber produksi rakyat serta alam secara sporadis. Bersamaan dengan itu, *Pela* dan *Gandong* yang selama ini menjadi *ikon* kerukunan dan perdamaian di Maluku juga mulai ditinggalkan, digantikan oleh solidaritas politik dan ekonomi yang sarat dengan muatan konflik. Kemudian di beberapa desa di Maluku sudah tidak lagi memiliki bahasa negeri apalagi bahasa tanah, karena pranta-pranta budaya yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan lokal telah dihancurkan. Aturan-aturan budaya mengalami disfungsi dan struktur-struktur pemerintahan lokal sudah tidak memiliki daya cengkeram.<sup>25</sup>

Mempertahankan orisinalitas budaya merupakan suatu hal yang mustahil, karena budaya selalu dinamis, hanya nilai-nilai budaya yang luhur merupakan hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Mengamati proses disfungsi budaya masyarakat Maluku yang sedemikian parah seperti itu, maka upaya melakukan revitalisasi budaya Maluku adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan.<sup>26</sup> Tesis di

---

<sup>25</sup> Shaleh Putuhena, "Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal di Maluku Tengah", *Makalah*, disampaikan pada Pemberdayaan Kebudayaan Lokal untuk Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, di Langgur, Tual, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001.

<sup>26</sup> Flore S., "Eksplorasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Tradisional Budaya Maluku untuk Pengembangan Masyarakat", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Budaya Maluku dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-60, 26 Juli 2005.

atas bisa dibenarkan dan berlaku untuk semua budaya yang ada di muka bumi ini. Pengaruh UU No. Tahun 1979 di sangat kuat, bahkan wilayah-wilayah adat yang diklaim masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat pun mulai terganggu. Mungkin saja nilai dan spirit (intrinsik) dari sebuah budaya bisa terpelihara, akan tetapi kemasan luar (ekstrinsik) sebuah budaya sangat potensial berubah. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya struktur kekuasaan pemerintah di dalam mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa yang terjadi di Maluku dewasa ini baik ranah intrinsik maupun ekstrinsik sama-sama mengalami erosi. Pada ranah intrinsik, budaya Maluku sedang mengalami krisis dan transisi identitas,<sup>27</sup> dan pada ranah ekstrinsik, budaya Maluku juga tengah digantikan oleh budaya-budaya luar, yang cenderung individualis dan pragmatis. Sebagaimana dapat lihat pada pergeseran permainan-permainan rakyat, misalnya permainan enggo (tara) atau kuda banjir yang butuh kolektivitas digantikan oleh *play station* serta VCD atau DVD dan lainnya yang cenderung individualis.<sup>28</sup>

Meletusnya konflik antarumat beragama di Maluku pada 1999 menunjukkan telah terjadi degradasi budaya yang cukup besar. Ikatan-ikatan solidaritas kultural telah tervirus oleh individualisme, oportunisme dan pragmatisme. Konflik ini sekaligus menjustifikasi semakin meredupnya nilai-nilai budaya masyarakat Maluku. Budaya Maluku dalam konteks ini hanya menjadi klaim yang sangat artikulatif dan mengiang dalam ingatan bersama (*colective memory*) masyarakat Maluku. Budaya

---

<sup>27</sup> Krisis identitas merupakan fenomena yang belakangan menarik perhatian banyak orang dalam varian perspektifnya, terutama dalam studi politik, budaya dan agama. Dalam banyak kasus konflik krisis identitas ini mengemuka sebagai *trigger* (pemicu) lahirnya konflik di berbagai belahan dunia. Konflik Maluku dan beberapa konflik yang terjadi di Indonesia dipicu oleh krisis identitas ini; identitas berbudaya, identitas beragama, dan identitas berbangsa. Identitas menjadi keprihatinan terbesar zaman kita, dan tentu “kebingungan identitas”, baik yang individual maupun yang kolektif, menjadi bahaya terbesarnya. Lihat Erik H. Erikson, *Identitas dan Siklus Kehidupan Manusia*, terj. Agus Cremers, SVD, Cet. I (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 181-182.

<sup>28</sup> Tara. Permainan ini dilakukan dengan membuat kotak-kotak bersegi empat sampai beberapa tingkat atau bagian. Tara dimainkan secara tim. Harus ada dua tim yang bertanding. Masing-masing tim terdiri dari tiga orang. Cara bermain Tara, kedua tim harus berhadap-hadapan. Ada tim yang menjaga batas dan ada yang berusaha melewati. Sedangkan kuda banjir adalah Permainan garis yang dimainkan lebih dari satu orang dengan menggunakan batu tipis yang dilemparkan ke garis lurus yang panjangnya sekitar 5-10 m. Siapa yang punya batu lebih mendekat garis dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian dari garis tersebut sang pemenang mengukur batu lawannya kemudian melempari batu lawan itu dengan batunya. H.M. Saleh PutuHena, dkk. *Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Bagian Tengah*, hlm. 184-185

Maluku kurang mampu lagi bekerja optimal sebagai sebuah sistem dan kekuatan sosial yang fungsional memberikan perlindungan, jaminan keamanan, dan kenyamanan bagi pemiliknya.

Kondisi ini belakangan menyadarkan masyarakat Maluku bahwa tantangan yang cukup besar dewasa ini yaitu tereduksinya spirit dan nilai-nilai budaya local dalam kehidupan sehari-hari. Pelbagai bentuk permasalahan yang terjadi dalam segenap sektor kehidupan, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, agama, sosial, dan seterusnya dipandang tidak mencerminkan manifestasi atau penerjemahan dari nilai-nilai dan spirit budaya Maluku, baik dalam cara berpikir, bertindak maupun kebijakan publik. Bahkan, kenyataan disfungsi nilai-nilai budaya ini dipandang sebagai faktor dominan, sekaligus determinan yang menyebabkan persoalan-persoalan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, agama, dan sosial semakin bertambah kompleks dan sulit dicari jalan pemecahannya.

Kesadaran ini pulalah yang menimbulkan memicu munculnya sebuah arus balik (*turning point*) yang melihat budaya sebagai modal sosial masyarakat Maluku. Gerakan ini bukan sekedar sebagai sesuatu nostalgia, akan tetapi yang dimaksudkan adalah sebuah gerakan revitalisasi yang secara intrinsik memiliki apresiasi yang tinggi terhadap nilai dan spirit budaya masyarakat Maluku dan pada saat yang bersamaan mencoba melakukan usaha-usaha transformatif, agar bisa menghadapi perkembangan masyarakat Maluku Tengah yang makin multikultural.

Upaya untuk melakukan revitalisasi dan transformasi budaya masyarakat Maluku, merupakan suatu kemestian. Upaya ini dalam rangka mewujudkan kesadaran multikulturalisme di Indonesia, yang selama ini dihancurkan oleh kebijakan penyeragaman. Padahal kesadaran hidup bersama dalam “Ke-Bhineka-an tetapi tetap “Ika” atau satu telah menjadi salah satu momentum pembentukan negara Republik Indonesia. Jauh sebelum adanya imajinasi tentang negara Indonesia, pada dasarnya keberadaan bangsa ini sudah plural, yaitu dari segi etnis, agama, warna kulit, dan bahasa. Kenyataan pluralitas bangsa ini kemudian diimajinasikan oleh para *founding fathers* sebagai satu bangsa, satu tanah

air, satu bahasa, dan satu tumpah darah, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dorongan untuk hidup bersama dalam kepelbagaian terus berproses, hingga tiba pada satu kesadaran bahwa kita memiliki nasib yang sama dan cita-cita yang sama, yaitu melepaskan diri dari kolonialisme. Tanpa membedakan latar belakang SARA, para *founding fathers* negara ini secara berani dan sadar bersepakat untuk hidup bersama di dalam satu negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Keberanian itu tercermin pada kenyataan bahwa Indonesia itu sangat plural, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara sosiologis memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi untuk ditata sebagai satu negara, untuk itu pula menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Adapun sikap yang sadar adalah adanya iktihad baik dan *positive thinking* bahwa keragaman yang ada pada bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan, oleh karena itu dapat dirajut dalam kebersamaan.

Hanya saja, proses menjadi Indonesia ini lebih dominan bersifat politis serta masih berada pada klaim teritori, sedangkan secara kultural Indonesia belum selesai. Akibatnya, keberanian dan kesadaran untuk hidup bersama yang sudah diimajinasikan dan diproklamasikan itu belakangan ini sedang mengalami tantangan disintegrasi sosial yang cukup signifikan, untuk tidak menyebut kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia ini telah mengalami distorsi. Serangkaian konflik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda yang hingga kini masih menyimpan luka nurani yang dalam, bahkan untuk beberapa daerah di negara ini kekerasan tersebut masih berlanjut, seakan menegasikan keberanian dan kesadaran tersebut. Lebih ironi lagi bahwa tindak kekerasan belakangan ini cenderung membentuk *spiral of violence*, (lingkaran kekerasan) yang mengitari hubungan antaragama dan etnis yang diboncengi kepentingan politik dan ekonomi. Konflik di Poso, Sambas, Kupang, Aceh dan khususnya di Maluku, merupakan fakta disintegrasi sosial tersebut. <sup>1</sup> Salah satu faktor mendasar yang menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dan kekerasan tersebut yaitu adanya kebijakan politik pembangunan lebih menegaskan atau mendahulukan “keikaaan” daripada “kebhinekaan” kita. Dalam banyak kasus konflik di pelbagai daerah di Indonesia, sebelum dan

sesudah konflik, penanganannya sering menonjolkan “keikaan,” kurang menyentuh realitas masyarakat yang plural. Konflik dan kekerasan di Maluku merupakan salah satu contoh dari rapuhnya tatanan pluralitas bangsa kita.

Jadi, pertanyaannya mengapa konflik dan kekerasan di Maluku yang terjadi sejak 1999 itu bisa terjadi dalam skala yang begitu besar dan kompleks? Padahal, masyarakat Maluku sebelumnya dikenal sangat toleran dalam kehidupan bersama, yaitu Salam (Komunitas Islam) dan Sarane (Komunitas Kristen) barsaudara, ikatan persaudaraan *Pela, Gandong, dan Larvul Ngabal*. Salah satu faktor penyebabnya terjadinya degradasi budaya, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Secara sistematis proses degradasi budaya tersebut dapat dilihat sebagai berikut: <sup>1</sup> *Pertama*, posisi *Pela, Gandong* dan *Larvul Ngabal* telah lama mengalami proses penghilangan spirit dan penghancuran oleh kekuasaan Orde Baru yang ditandai dengan proyek desaisasi dan penghancuran negeri-negeri adat. Padahal *Pela, Gandong, dan Larvul Ngabal* selama ini eksis bukan pada desa atau lurah, tetapi pada *Aman, Hena* dan negeri atau *Ohoi*. Pada empat kategori inilah *Pela, Gandong* dan *Larvul Ngabal* menemukan spirit dan konteksnya. *Kedua*, tantangan Neo-liberalisme dan kapitalisme yang ditandai dengan cara berfikir hedonis dan pragmatis membuat relasi-relasi sosial yang bersifat kolegial terpinggirkan dan yang dominan adalah hubungan-hubungan yang lebih bersifat mekanistik. Agresi neo-liberalisme dan kapitalisme sebagai realitas global tidak saja mendominasi bidang ekonomi, tetapi juga mengkonstruksi cara hidup masyarakat dunia dengan pola hidup yang individualis, hedonis, dan pragmatis, sekaligus menghancurkan identitas masyarakat dunia, terutama pada negara-negara miskin dan negara-negara ketiga. Masyarakat Maluku sebagai bagian dari komponen masyarakat dunia pun mendapatkan efek hegemoni neo-liberalisme dan kapitalisme tersebut. Tak Pelak lagi atas nama modernisasi dan pembangunan, *local wisdom* seperti *Pela, Gandong* dan *Larvul Ngabal* turut mengalami disfungsi.

1

*Ketiga*, agama sebagai fenomena sosial. Terdapat gerakan purifikasi yang mau membersihkan agama dari nilai-nilai yang dianggap bukan agama. Fenomena agama seperti ini juga merupakan sebuah problem bagi agama-agama di dalam menghadapi tantangan globalisasi dan akulturasi budaya, tetapi dalam penerapannya sering bersifat ambigu. Maka, yang sering menjadi tertuduh dan dikorbankan adalah kebudayaan-kebudayaan lokal (*local wisdom*). Dalam konteks ini, dengan kekuasaan yang dimiliki agama dibersihkan dari unsur-unsur budaya yang dianggap mengotori kemurniaan agama dan keyakinan. Apalagi spirit budaya itu dianggap lebih mendominasi praktik hidup masyarakat. Purifikasi agama ini membuat persaudaraan dalam budaya *Pela, Gandong* dan *Larvul Ngabal* kehilangan spiritnya. Walaupun perekat – perekat sosial seperti ini ada dan dilaksanakan oleh masyarakat, dianggap bukan urusan iman atau agama, baik Islam maupun Kristen, melainkan hanya urusan budaya yang bersifat keduniaan saja. Padahal, peran perekat-perekat sosial tersebut secara substansial sangat sejalan dengan pesan-pesan universalitas semua agama.

*Keempat*, politik identitas. Politisasi agama untuk kepentingan ekonomi dan politik (kekuasaan) membuat masyarakat menjadi masyarakat yang tersegregasi menurut kelompok agama dan etnisnya. Dalam konteks Maluku, muncul isu kristenisasi dan islamisasi sebagai musuh imajiner. Efeknya, persaudaraan di Maluku lebih dikondisikan pada persaudaraan dalam kepentingan politik, bukan persaudaraan sebagai orang Maluku.

Bertolak dari pelbagai problematika budaya Maluku di atas, maka upaya-upaya revitalisasi budaya lokal dibutuhkan pendekatan yang strategis dan menyentuh akar masalah yang dihadapi.

1

**Pertama;** Melakukan pengkajian dan penerapan kebijakan pembangunan yang berbasis antropologi dan budaya orang Maluku (masyarakat lokal). Sebab selama ini proses pembangunan telah menceraubuti dan mengalienasi masyarakat dari identitas kulturalnya. Masyarakat dibangun menurut budaya dan antropologi masyarakat lain. Pembangunan berbasis budaya lokal ini meliputi pelbagai

aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Untuk mewujudkannya pendidikan merupakan instrumen budaya yang sangat efektif dan signifikan digunakan bagi revitalisasi dan transformasi budaya. Karena itu, usaha-usaha yang selama ini dilakukan di Maluku dengan memasukan sejarah dan budaya lokal Maluku sebagai Muatan Lokal (Mulok) di sekolah-sekolah formal merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis untuk ditingkatkan. Misalnya pembuatan buku ajar sejarah dan budaya Maluku serta kurikulumnya untuk diajarkan di sekolah-sekolah formal, masuk dalam muatan lokal secara terintegrasi ke dalam mata Pelajaran lain yang relevan.

Upaya-upaya seperti ini antara lain telah dilakukan oleh JIKA membuat Pendidikan Orang Basudara (POB) yang diterapkan di sekolah-sekolah rekonsiliasi di Maluku, di antaranya SMPN 2 Ambon, SMA Muhammadiyah Ambon, SMP Al-Hilal Ambon, dan SMUN 3 Ambon. Kemudian PTD-UNDP membuat Kurikulum Pendidikan Orang Basudara (POB) sejak tahun 2002-2005. Selain itu pada 2008-2009 Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maluku (PS2BM) bekerja sama dengan PTD-UNDP Provinsi Maluku, juga membuat buku Sejarah dan Kearifan Hidup Masyarakat Maluku Bagian Tengah, yang diperuntukan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) disajikan secara integral dengan mata Pelajaran lain yang relevan. Proses pembuatan buku ini diawali dengan penelitian, seminar, setelah buku dicetak dilanjutkan dengan TOT untuk para guru, dalam rangka membangun kapasitas guru dalam penerapan buku tersebut di sekolah. Di bidang lingkungan hidup, PTD-UNDP menerbitkan buku ajar dan kurikulum pendidikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal di Maluku, pada 2008. Pada 2004 ICIP Jakarta juga telah menerbitkan buku revitalisasi budaya lokal secara umum di daerah-daerah konflik, salah satunya tentang budaya Maluku. Walau buku ini bukan buku ajar, tetapi isinya sangat baik sebagai salah satu sumber pembelajaran.

**Kedua;** Transformasi budaya bagi proses reintegrasi sosial melalui <sup>1</sup> perekat-perekat sosial tersebut mesti dikontekstualisasikan seiring dengan tantangan masyarakat yang semakin multikultural.

1  
Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan sebuah integrasi multikultural yang lebih holistik dan komprehensif. Sebab budaya lokal seperti *Gandong* sebagai persaudaraan yang bersifat geneologis hanya terbatas pada negeri-negeri yang punya ikatan darah, demikian halnya dengan ikatan *Pela* merupakan persaudaraan yang 1  
dibuat oleh para leluhur orang Maluku Tengah terdahulu, masih terbatas pada kebutuhan dan tantangan masyarakat yang homogen dan terbatas pada dua buah atau beberapa negeri adat saja. Sedangkan dewasa ini khususnya di kota-kota migrasi dari luar sangat banyak, dan tak dapat dihindari. Bahkan migrasi dari etnis Buton Sulawesi Tenggara yang hidup dan menetap serta membuat dusun-dusun di petuanan negeri-negeri adat, sudah ada kurang lebih satu abad lebih yang 1  
lalu. Adapun *Larvul Ngabal* di Maluku Tenggara walaupun mengikat komunitas yang lebih luas, tetapi ke depan juga memiliki tantangan yang cukup besar, karena perkembangan masyarakat plural yang semakin kompleks serta tingkat dinamika sosial ekonomi makin tinggi. Dimana faktor-faktor ini memiliki efek yang cukup signifikan bagi hubungan-bubungan sosial. Oleh karena itu sebagai identitas kultural yang telah eksis beratus – ratus tahun, *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal* harus ditransformasikan agar tetap kontekstual dan tidak kehilangan perannya di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena masyarakat Maluku dewasa ini adalah bukan lagi masyarakat homogen tetapi masyarakat multicultural dengan tingkat dinamika sosial yang makin kompleks.

1  
Polarisasi pendatang (orang dagang) dan bukan negeri adat versus anak adat dan negeri adat secara *vis-a. vis* dewasa ini semakin membuat masyarakat menjadi tersegmentasi dan tersegregasi, bukan hanya pada masalah agama tetapi juga pada masalah etnis. Jika identitas kultural masyarakat Maluku ini tidak ditransformasikan menjadi kekuatan perekat dan kekuatan resolusi konflik dalam masyarakat makin multikultural, maka hal ini dapat menjadi sumber konflik yang cukup besar. Fenomena konflik antara negeri-negeri adat dengan dusunnya, yang rata-rata beretnis Buton Sulawesi

Tenggara di Maluku Tengah dewasa ini ini merupakan contoh yang paling faktual dari sumber konflik antar etnis tersebut.<sup>29</sup>

Untuk melakukan transformasi budaya dalam masyarakat Maluku yang multikultural, faktor pendidikan merupakan sektor yang punya pengaruh yang cukup signifikan. Karena itu upaya-upaya memasukan sejarah dan budaya lokal Maluku dalam Mulok di atas, harus disertai dengan melakukan transformasi budaya, agar lebih bisa diterima dan digunakan dalam masyarakat Maluku yang multikultur. Selain itu, pemerintah di tingkat provinsi Maluku dan kabupaten se- Maluku, perlu membuat Perda Adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya lokal yang ada, serta mengatur hubungan antara masyarakat yang multikultur, khususnya hubungan negeri adat dan dusun-dusunnya melalui Perda Adat yang lebih transformatif.

**Ketiga:** Inkulturasi agama dan budaya lokal (nilai-nilai kearifan lokal) merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Mengingat pascakonflik 1999 gerakan puritanisasi agama di Maluku cukup kuat. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya gerakan puritanisasi agama ini dilakukan melalui dakwah di mesjid, pengajian (*khalaqah*) dan pendirian pesantren, yang pola pendidikannya jauh berbeda dengan pesantren NU dan Muhammadiyah<sup>30</sup>. Gerakan ini berjalan secara massif dan telah memiliki cukup banyak masa terutama di kota Ambon. Selain itu mereka juga telah banyak menguasai mesjid-mesjid NU dan Muhammadiyah. Pola pengajaran mereka lebih menekankan pada aspek simbol-simbol agama, seperti penggunaan cadar bagi para santriwati sejak tingkat Ibtidaiyah (Sekolah Dasar), pemakaian baju gamis dan celana hanya sampai di betis, penggunaan jenggot bagi para santri laki-laki.

---

<sup>29</sup>Abidin, Wakano, dkk. *Hubungan Negeri Adat dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat, Hasil Penelitian*, (PS2BM dan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, 2008).

<sup>30</sup> Pembangunan pesantren-pesantren ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi dan Ikhwanul Muslimin, yang pola pengajarannya sangat menekankan pada penguatan identitas Islam, sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kristenisasi dan modernisasi. Santri-santri perempuan sejak usia ibtidaiyah (Sekolah Dasar) sudah menggunakan cadar, sedangkan para santri laki-laki memakai pakai gamis serta celana yang modelnya hanya sampai di betis. Bagi santri laki-laki yang sudah berjambang harus memakai jambang. Pola pendidikan seperti ini terkesan arabisasi.

Sedangkan di Kristen muncul gerakan Kristen Kharismatik yang cukup massif melalui media cetak dan elektronik. Bagi kelompok Islam seperti ini, penggunaan simbol-simbol agama tersebut dilakukan sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kristenisasi dan modernisasi. Sedangkan gerakan Kristen radikal dan Kristen kharismatik ini cenderung ke Barat dan menjaga jarak dengan agama-agama lain karena adanya semangat pietisme. Selain itu masih sulitnya membedakan mana yang menjadi nilai-nilai Kristen yang universal dan mana yang merupakan budaya Barat.

Menurut kelompok-kelompok agama yang radikal ini, persaudaraan yang hakiki itu hanya sebatas seagama. Misalnya dalam Kristen persaudaraan Kristiani, dan di dalam *Ukuwah Islamiyah* lebih diartikan sebagai persaudaraan sesama Muslim, dan persaudaraan dengan non Muslim itu ada batasnya. Padahal sejatinya persaudaraan yang bersifat Kristiani dan *Ukhuwah Islamiyah* bersifat universal. Karena itu dewasa ini bentuk-bentuk kerja sama, seperti pembangunan mesjid dan gereja secara bersama-sama di negeri-negeri yang punya ikatan *Pela* dan *Gandong* merupakan praktek budaya yang bertentangan dengan agama, baik Islam maupun Kristen. Karena antara hak yang batil tidak boleh dicampur aduk. Persaudaraan yang mereka tekankan adalah persudaraan seagama, bukan *Pela* dan *Gandong*. Gerakan puritanisasi seperti ini sangat berbahaya, karena akan menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat serta akan menimbulkan polarisasi serta mempertegas segregasi sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Selain itu pola seperti ini akan mendangkalkan pemahaman keagamaan masyarakat. Padahal gerakan seperti ini bukan islamisasi atau kristenisasi tetapi arabisasi dan westernisasi.

Karena itu inkulturasi agama dan budaya harus dilakukan melalui gerakan dakwah dan pendidikan yang bersifat kultural. Bahwasanya segala bentuk budaya luhur dan pro-kehidupan pasti relevan dengan ajaran Islam. Inkulturasi ini juga sangat membutuhkan gerakan kontekstualisasi agama. Karena itu perlu dikembangkan studi-studi keagamaan yang bersifat kontekstual. Model dakwah dan

pendidikan yang kultural ini dilakukan di rumah-rumah ibadah (mesjid dan gereja), majelis-majelis agama (majelis taklim), sekolah formal, sekolah non formal (sekolah minggu dan taman pengajian), serta media sosialisasi lainnya seperti seminar, diskusi serta media cetak dan elektronik.

**1** Agama mestinya dipahami sebagai kekuatan etik – profetik yaitu rahmat bagi kemanusiaan universal (*rahmatanlilalamin*). Beragama dalam konteks ini akan mampu mengakomodasi kehidupan yang multikultural, karena konsep agama sebagai rahmat bagi semesta alam mengakui realitas multikultural sebagai desain Tuhan atau : *given*, bukan pilihan manusia (Q.S. Al-Hujarat 13) “Wahai manusia sesungguhnya kami (Tuhan) telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, agar menjadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa”.

**3** Beragama yang mengakui dan menerima realitas masyarakat yang plural akan mampu membina dan menciptakan harmoni kehidupan. Sedangkan beragama yang menolak realitas plural akan menjadi kekuatan yang destruktif. Pengakuan dan penerimaan terhadap multikulturalisme tidak terbatas pada pluralitas etnis dan agama yang ada, tetapi dalam konteks yang lebih luas yaitu mengakui dan menerima identitas-identitas kultural yang tumbuh dan melekat pada masyarakat tersebut sebagai hasil karsa akal budi manusia itu sendiri. Apabila agama mampu ditransformasikan pada level aksi yang mengakui dan menerima realitas multikulturalisme seperti di atas, maka budaya-budaya lokal seperti **1** *Pela, Gandong* dan *Larvul Ngabal* akan mendapat sprit dari agama sehingga agama dan budaya bukan lagi menjadi kekuatan yang bersifat *vis-à-vis*, tetapi menjadi kekuatan yang integratif bagi transformasi masyarakat yang multikultural.

#### D. Kesimpulan

1. *Siwalima* merupakan Akar Budaya masyarakat Maluku yang bersifat monodualistik, yang mengakui perbedaan tetapi tetap punya kesadaran bahwa mereka itu bersaudara, yang dalam istilah lokal Maluku yaitu *Orang Basudara*. Filosofi dari hidup *Orang Basudara* yaitu “potong di kuku, rasa did aging”, “ale rasa, beta rasa”, (kamu rasa, saya juga rasa, serta “sagu salempeng dipatah dua”, (sepotong sagu dibagi dua). Makna hidup *Orang Basudara* ini bersifat pro-eksistensi, yaitu adanya rasa saling memiliki serta rasa tanggung jawab untuk saling berbagi kasih sayang, saling membahagiakan, saling berbagi kesejahteraan, dan sebagainya. Manifestasi dari semangat *Siwalima* itu tercermin dalam budaya *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, *Famili*, dan sebagainya.
2. Kearifan lokal punya peran yang sangat penting dalam membina serta membangun persaudaraan dan perdamaian. Peran budaya lokal seperti *Pela* dan *Gandong* pernah menjadikan Maluku sebagai salah satu ikon perdamaian di Indonesia dan di dunia. Selain itu, budaya lokal turut berperan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di Maluku pada saat konflik antara komunitas Islam dan Kristen pada 1999-2004.
3. Melemahnya peran budaya lokal seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, *Famili*, antara lain dipengaruhi pengrusakan akar budaya masyarakat Maluku oleh kebijakan pemerintah Kolonial Barat serta politik *Divide et Impera*, munculnya regulasi pemerintah RI tentang sistem pemerintahan desa yang diseragmkan melalui UU No. 5 tahun 1979, gerakan purifikasi agama, neo-liberalisme serta neo-kapitalisme, dan politik identitas serta politisasi agama
4. Upaya menjadikan kembali budaya lokal sebagai modal sosial untuk pembangunan perdamaian di Maluku harus dimulai dengan upaya revitalisasi dan transformasi nilai-nilai kearifan lokal.



# Maluku dan Keindahan Sejarahnya

## ORIGINALITY REPORT

# 16%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://faisalhammadfani.blogspot.com">faisalhammadfani.blogspot.com</a> Internet	1056 words — 11%
2	<a href="https://mamala-amalatu.blogspot.com">mamala-amalatu.blogspot.com</a> Internet	97 words — 1%
3	<a href="https://tugasakhiramik.blogspot.com">tugasakhiramik.blogspot.com</a> Internet	83 words — 1%
4	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	59 words — 1%
5	<a href="https://frnsly.blogspot.com">frnsly.blogspot.com</a> Internet	47 words — < 1%
6	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	43 words — < 1%
7	<a href="https://lembagaantarimanmaluku.wordpress.com">lembagaantarimanmaluku.wordpress.com</a> Internet	43 words — < 1%
8	<a href="https://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com">tahkimjurnalsyariah.wordpress.com</a> Internet	36 words — < 1%
9	<a href="https://fexdoc.com">fexdoc.com</a> Internet	16 words — < 1%
10	<a href="https://marcuspessireron.blogspot.com">marcuspessireron.blogspot.com</a> Internet	15 words — < 1%
11	<a href="https://ia-ushuluddin.stainkudus.ac.id">ia-ushuluddin.stainkudus.ac.id</a> Internet	12 words — < 1%

12	Roy Ellen. "Pottery production and trade in the Banda zone, Indonesia", Indonesia and the Malay World, 2019 Crossref	12 words — < 1%
13	1001rommy.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
14	jurnal.untagsmg.ac.id Internet	11 words — < 1%
15	issuu.com Internet	11 words — < 1%
16	journal.uinjkt.ac.id Internet	9 words — < 1%
17	de.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
18	frenslly-angelvoice.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
19	sukarma-puseh.blogspot.com Internet	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON